

**PEDOMAN Pengerjaan Jawaban Pemerintah  
Terhadap Pemandangan Umum DPR-RI  
Tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2010**

Tanggal, 20 Agustus 2009

---

**I. UMUM**

A. Judul **Kode** adalah **Kode Masalah** :

- Kode masalah : **18** (Masalah Pajak Penghasilan)  
diketik bold, misalnya : **Kode : 18**

sedangkan kata **Pertanyaan** diikuti dengan :

- Nama Fraksi : **FPGolkar, FPDIP, FPPP, FPD, FPAN, FKB, FPKS, FBPD, FPBR, dan FPDS**
  - Nomor urut pertanyaan : **II.1.a**
  - Nomor halaman : **hal.5**
- diketik **bold**, misalnya :

**Pertanyaan**

**CONTOH** : (di lembar pertanyaan)

**Kode : 18**

**Pertanyaan : FPPP/II.1.a/hal.5**

(pertanyaan/permasalahan/tanggapan, digunting dan ditempel disini)

**Jawaban : (DJP, DJPb, Bappenas)**

- B. Pertanyaan/Permasalahan/Tanggapan tertulis dari tiap Fraksi tidak perlu diketik ulang, cukup **digunting/ditempel (dikliping)** dengan lengkap dan rapi. Dalam lembar **Jawaban**, Pertanyaan/Permasalahan/Tanggapan diusahakan singkat, bila perlu dilengkapi latar belakang pertanyaan. **Lembar Pertanyaan** dan **Lembar Jawaban** masing-masing **terpisah** dan diberi **Kode**, untuk memudahkan penggabungan mengingat di dalam buku jawaban tidak dicantumkan pertanyaan tetapi langsung **jawaban**.

- C. Judul jawaban diketik bold, dengan **Kode Masalah**. Begitu pula **jawaban** atau **jawaban alternatif** diikuti dengan instansi yang menjawab. Namun demikian, mengingat waktu penyelesaian jawaban ini sangat singkat, maka diupayakan agar jawaban telah digabung (diedit) oleh penanggung jawab, sehingga tidak ada lagi jawaban alternatif.

**CONTOH** : (di lembar jawaban)

**Kode : 18**

**Pertanyaan : FPPP/II.1.a/hal.5**

**Jawaban : (DJP)**

**Jawaban : (Bappenas) – Alternatif**

- D. Dalam menyiapkan jawaban Pemerintah untuk pandangan umum DPR-RI nama fraksi ditulis lengkap (**bold**), yaitu:

FPGolkar - **Fraksi Partai Golongan Karya**

FPDIP	- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
FPPP	- Fraksi Partai Persatuan pembangunan
FPD	- Fraksi Partai Demokrat
FPAN	- Fraksi Partai Amanat Nasional
FKB	- Fraksi Kebangkitan Bangsa
FPKS	- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
FBPD	- Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi
FPBR	- Fraksi Partai Bintang Reformasi
FPDS	- Fraksi Partai Damai Sejahtera

Apabila suatu pertanyaan disampaikan oleh sembilan fraksi sekaligus, maka urutan menjawab (*kalaupun tidak ada perubahan urutan*) adalah **FPGolkar, FPDIP, FPPP, FPD, FPAN, FKB, FPKS, FBPD, FPBR, dan FPDS.**

Contoh :

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan (lain-lain Fraksi)** mengenai ..... kiranya dapat dijelaskan bahwa .....

## II. KODE MASALAH

1. Dasar hukum Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN
2. Peran Strategis kebijakan Fiskal
3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro secara Umum
4. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
5. Sistematika Penulisan Nota keuangan dan RAPBN 2010
6. Perkembangan terkini perekonomian Indonesia
7. Prospek Perekonomian Tahun 2010
8. Pertumbuhan Ekonomi
9. Nilai Tukar Rupiah
10. Inflasi
11. Suku Bunga SBI 3 Bulan
12. Harga dan *Lifting* Minyak Mentah ICP
13. Produksi Minyak Mentah Indonesia
14. Neraca pembayaran Indonesia
15. Pendapatan Negara dan Hibah
16. Penerimaan Dalam Negeri
17. Masalah makro yang berkaitan dengan Penerimaan Perpajakan
18. Pajak Penghasilan (PPH)
19. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
20. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
22. Cukai
23. Pajak Lainnya
24. Pajak Perdagangan Internasional
25. Bea masuk
26. Pajak/pungutan Ekspor
27. Masalah makro yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
28. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas
29. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) NonMigas
30. Penerimaan Pertambangan Umum
31. Penerimaan Kehutanan
32. Penerimaan Perikanan
33. Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
34. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
35. Perkembangan Hibah

36. Masalah makro yang berkaitan dengan Belanja Negara
37. Prioritas Nasional dan RKP
38. Anggaran Infrastruktur
39. Anggaran Kemiskinan
40. Anggaran Pendidikan
41. Belanja Pemerintah Pusat
42. Belanja Pegawai
43. Belanja Barang
44. Belanja Modal
45. Pembayaran Bunga Utang
46. Utang Dalam Negeri
47. Utang Luar Negeri
48. Subsidi Energi
49. Subsidi Non Energi
50. Belanja Hibah
51. Bantuan Sosial
52. Belanja Lain-lain
53. Dana Hasil Optimalisasi
54. Menurut Jenis Belanja secara Umum
55. Menurut Organisasi
56. Menurut Fungsi
57. Masalah makro yang berkaitan dengan Belanja untuk Daerah
58. Dana Perimbangan
59. Dana Bagi Hasil
60. Dana Alokasi Umum
61. Dana Alokasi Khusus
62. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
63. Dana Otonomi Khusus
64. Dana Penyesuaian
65. Keseimbangan Umum dan Defisit Anggaran
66. Masalah makro yang berkaitan dengan Pembiayaan Anggaran
67. Pembiayaan Dalam Negeri
68. Perbankan Dalam Negeri
69. Non-perbankan Dalam Negeri
70. Privatisasi
71. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan
72. Surat Utang Negara (SUN)
73. Penyertaan Modal Negara
74. Pembiayaan Luar Negeri
75. Pinjaman Luar Negeri
76. Pinjaman Program
77. Pinjaman Proyek
78. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri